

Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi

Andayani, Muhrisun Afandi*

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email*: muhrisun@uin-suka.ac.id

Abstrak. Artikel ini merupakan bagian dari laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat terkait advokasi terhadap komunitas difabel di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mengakses pendidikan tinggi. Meskipun fokus dari kegiatan pengabdian ini adalah penyandang disabilitas yang masih dalam rentang usia pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, namun kegiatan ini didesain untuk menjangkau (outreach) komunitas penyandang disabilitas dalam skala luas, termasuk di dalamnya pemangku kebijakan dan pihak-pihak lain terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Komunitas penyandang disabilitas di Indonesia sendiri, dengan segala upaya yang dilakukan sejauh ini, telah terbukti banyak memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam meningkatkan posisi tawar mereka sebagai sebuah kelompok marginal dalam melakukan transformasi sosial maupun dalam mengakses hak-hak mereka di masyarakat, termasuk hak atas pendidikan yang layak di semua jenjang. Ironisnya, pihak-pihak yang paling dekat dengan kehidupan penyandang disabilitas sendiri, seperti keluarga, teman dan support system lainnya masih kurang memberikan dukungan kepada mereka untuk mengakses pendidikan, terlebih pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karenanya, kegiatan pengabdian ini melibatkan semua support system di sekitar komunitas penyandang disabilitas. Tim pengabdian juga melakukan upaya advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk memenuhi hak pendidikan komunitas ini sesuai dengan amanat regulasi nasional maupun instrumen hukum internasional.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Difabel, Advokasi, Pemberdayaan, Pendidikan Tinggi

A. Pendahuluan

Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin adanya kesempatan yang sama bagi difabel pada semua aspek kehidupan, termasuk hak mendapatkan layanan pendidikan yang layak pada semua jenjang pendidikan dan jenis keilmuan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah terlebih dahulu mengadopsi instrumen internasional CRPD (*The Convention of the Human Rights of Persons with Disabilities*) atau Konvensi Hak Asasi Difabel pada tanggal 18 Oktober 2011 melalui Undang-undang No. 19 tahun 2011. Konvensi tersebut secara tegas mengamanatkan semua negara yang telah meratifikasinya, tidak terkecuali Indonesia, untuk memastikan tersedianya sistem pendidikan yang inklusif pada semua jenjang. Kementerian Agama RI termasuk salah satu kementerian yang dengan cepat merespon ratifikasi CRPD tersebut dalam kebijakan pendidikannya. Melalui surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No SJ/B.I/I/HM.00/1655/2012 tertanggal 24 April 2012, unit-unit di bawah Kementerian Agama dihimbau untuk segera mengimplementasikan CRPD dengan membuka aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Namun dalam praktiknya hingga saat ini sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia, terutama perguruan tinggi, belum memberikan kesempatan yang semestinya kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan yang menjadi hak mereka. Beberapa perguruan tinggi memang telah

membuka akses bagi penyandang disabilitas. Namun demikian terbukanya akses di beberapa perguruan tinggi untuk penyandang disabilitas tersebut belum dibarengi dengan dukungan layanan yang memadai. Layanan dan fasilitas yang disediakan sebagai pendukung kegiatan belajar para penyandang disabilitas di perguruan tinggi di Indonesia secara umum masih sangat terbatas. Aturan dan kebijakan di beberapa perguruan tinggi bahkan bertabrakan dengan prinsip inklusifitas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Ketersediaan dan akurasi data terkait penyandang disabilitas di Indonesia menjadi persoalan yang sudah lama diangkat dalam beberapa penelitian dan publikasi sebelumnya. Hingga saat ini belum ada data statistik yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang menunjukkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi di Indonesia. Namun demikian, menurut data yang dihimpun oleh Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa hanya sekitar 250 orang dengan disabilitas di Indonesia yang pada saat itu bisa memperoleh akses pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jumlah total populasi penyandang disabilitas sendiri, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1995, diperkirakan sekitar 3,5 juta jiwa, atau sekitar 1,5 persen dari total populasi penduduk Indonesia saat itu. Data sensus yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2000 mengindikasikan jumlah populasi difabel yang lebih kecil, yaitu 1.465.280 jiwa.

Estimasi PBB menyebutkan bahwa 10 persen dari jumlah penduduk di suatu negara adalah difabel. Oleh karenanya, dengan jumlah populasi di Indonesia saat ini maka jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berkisar 30 juta jiwa. Menurut UNDP, dari jumlah itu, hanya 3% difabel yang melek huruf (*literate*). Dalam konteks Indonesia, dapat diartikan bahwa hanya sekitar 10 ribu penyandang disabilitas yang melek huruf. Data terakhir (2016) terkait jumlah anak usia sekolah dengan berbagai jenis disabilitas di Indonesia diperkirakan sekitar 2,5 juta. Namun demikian dari jumlah tersebut hanya 17 persen yang terdaftar di sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah luar biasa (SLB), sedangkan sisanya (83 persen) tidak bersekolah.¹

Terlepas dari akurasi data-data dari berbagai sumber tersebut di atas, data tersebut secara pasti mengindikasikan secara kuat kenyataan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di Indonesia dalam ranah pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.² Upaya pemerintah melalui kebijakan sekolah dan perguruan tinggi inklusi masih terus digalakkan untuk membawa komunitas penyandang disabilitas masuk dunia pendidikan. Namun demikian, hasil yang diperoleh masih jauh dari apa yang diharapkan.

Faktanya, sebagaimana telah disinggung di atas, akses untuk masuk di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas hanya merupakan langkah awal dari pemenuhan hak mereka. Mereka yang berhasil masuk ke perguruan tinggi masih menghadapi masalah yang sangat beragam dan kompleks lainnya. Para mahasiswa penyandang disabilitas masih harus terus berjuang untuk mendapatkan perlakuan yang tepat dan non-diskriminatif. Misalnya, di dalam kampus sendiri mereka masih harus berbenturan dengan kenyataan bahwa kurikulum dan strategi pembelajaran yang diterapkan para dosen masih belum adaptif, lingkungan sosial kampus yang belum ramah, bangunan dan prasarana yang tidak aksesibel dan lain sebagainya. Di luar kampuspun komunitas penyandang disabilitas masih perlu berjuang untuk mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan, mengingat masih tingginya tingkat diskriminasi terhadap komunitas ini di masyarakat.

¹ Plan International Indonesia, *Child Rights Situation Analysis in Indonesia in 2016* (Jakarta: Plan International, unpublished)

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Sensus Tahun 2000*, (Jakarta: BPS, 2001). Lihat juga Andayani, et al., *Laporan Penelitian Problem Pembelajaran dan Strategi Coping Mahasiswa Tunarungu/Wicara di PTAIN: Studi Fenomenologis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*, PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 3.

Kenyataan minimnya jumlah komunitas penyandang disabilitas yang memiliki akses memasuki perguruan tinggi tentu saja sangat memprihatinkan. Hal ini bukan semata-mata karena pendidikan adalah hak setiap orang, namun lebih jauh lagi karena pendidikan tinggi merupakan salah satu kunci perubahan, baik perubahan untuk diri penyandang disabilitas maupun perubahan pada masyarakat pada umumnya. Komunitas akademik adalah agen perubahan yang diharapkan dapat mengubah individu, kelompok, komunitas atau negara. Terkait dengan penyandang disabilitas, akses mereka pada perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi faktor utama bagi upaya-upaya perubahan dan pemberdayaan mereka, mengingat kenyataan betapa marginalnya posisi mereka dalam aspek sosial, budaya dan politik di masyarakat.

Beberapa studi menemukan banyak faktor yang melatarbelakangi minimnya jumlah penyandang disabilitas yang memiliki akses pada pendidikan tinggi, tidak hanya di Indonesia namun juga di negara-negara lain di dunia pada umumnya.³ Untuk konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh PSLD dan World Bank di tahun 2010, misalnya, mengungkapkan sedikitnya ada 2 (dua) faktor utama yang menghambat akses penyandang disabilitas di perguruan tinggi. *Pertama*, kurangnya dukungan dari lingkungan sosial, baik keluarga, teman, guru dan lainnya. *Kedua*, minimnya fasilitas infrastruktur dan suprastruktur (kebijakan) di insitusi pendidikan tinggi di Indonesia yang bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, dimana hal ini menyebabkan mereka takut dan berfikir ulang untuk memasuki perguruan tinggi meskipun akses untuk mereka sudah terbuka.⁴

Didasari oleh beberapa persoalan tersebut di atas maka kegiatan pengabdian ini dimaksudkan sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan bagi komunitas penyandang disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan akses mereka dalam mengakses pendidikan tinggi. Seperti telah disinggung sebelumnya di atas bahwa akses terhadap pendidikan tinggi bagi dpenyandang disabilitas diharapkan enjadi salah satu fator kunci bagi pemberdayaan komunitas ini dalam skala luas. Oleh karenanya kegiatan pengabdian ini menjangkau penyandang disabilitas tidak hanya pada level individu namun juga pada level komunitas.

Faktanya, seperti disebutkan di atas, pada umumnya keluarga, teman, *support system* dan lingkungan para penyandang disabilitas masih kurang memberikan dukungan kepada konumitas ini untuk memasuki dunia pergruan tinggi karena berbagai macam alasan. Oleh karena itu di antara sasaran utama dari kegiatan pemberdayaan ini adalah upaya peningkatan kapasitas para penyandang disabilitas agar memiliki pemahaman diri (*insight*) dan kesadaran kritis akan pentingnya pendidikan tinggi. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong mereka untuk mengembangkan kekuatan diri (*power*) dan independensi (kemandirian) untuk mengatasi hambatan dari lingkungannya. Berdasarkan beberapa kegiatan pemberdayaan serupa yang dilakukan bagi komunitas penyandang disabilitas di beberapa negara menunjukkan bahwa kekuatan komunitas memberikan kontribusi yang signifikan, baik terhadap pemberdayaan (*empowering*) masing-masing individu penyandang disabilitas di dalamnya maupun untuk meningkatkan posisi tawar mereka sebagai sebuah kelompok marginal dalam melakukan transformasi sosial dan mengakses hak-hak mereka di masyarakat.⁵

Dari berbagai inisiatif pemberdayaan serta penelitian terkait isu disabilitas yang telah dilakukan di PLD (Pusat Layanan Difabel) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlihat betapa pentingnya kegiatan pemberdayaan bagi siswa-siswi penyandang disabilitas untuk dilakukan secara berkesinambungan. Ada

³ International Disability and Development Consortium (IDDC), *Costing Equity: The Case for Disability-responsive Education Financing* (Brussels: IDDC, 2016);

⁴ The World Bank, AHED-UPESD, & PSLD UIN Sunan Kalijaga, *Equity and Access in Tertiary Education* (2010); PSLD UIN Sunan Kalijaga, *Eksklusi Sosial terhadap Mahasiswa Difabel di Lingkup UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2007).

⁵ Lihat Phillips S. & Clarke A., *Pathways for Disabled Students to Tertiary Education and Employment: Case Studies from Ireland* (Dublin: OECD Report, 2010).

beragam asumsi tentang disabilitas yang berkembang di masyarakat, dimana pada tingkatan tertentu akhirnya asumsi-asumsi tersebut diinternalisasi oleh penyandang disabilitas sendiri. Salah satu contohnya adalah asumsi bahwa penyandang disabilitas kurang memiliki kapasitas akademik yang tidak jarang diamini oleh penyandang disabilitas sendiri sebagai sebuah fakta. Keyakinan ini pada akhirnya menempatkan dan membatasi komunitas ini pada bidang pekerjaan yang sangat teknis, spesifik dan cenderung *stereotypical*, seperti menjadi tukang pijit bagi tuna netra, menjadi penjahit dan pembuat kerajinan bagi tuna rungu dan tuna daksa, dan lain sebagainya. Dalam kasus Indonesia, ironisnya beberapa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial, misalnya, masih mengesampingkan peningkatan kemampuan akademik penyandang disabilitas. Sebaliknya kegiatan-kegiatan pemerintah terkait pemberdayaan penyandang disabilitas masih terbatas pada pelatihan vokasi yang sangat spesifik, seperti pelatihan menjahit, memijit, membuat kerajinan tangan, dan sejenisnya yang justru semakin menguatkan *stereotype* bagi penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan di atas. Dengan kata lain, kegiatan pemberdayaan yang ada selama ini justru menjadi bentuk *disempowering* bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi penyandang disabilitas, karena mereka menjadi sulit untuk melakukan perubahan atau transformasi yang signifikan, baik terkait individu, kelompok/keluarga dan masyarakat.

Dari berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan oleh PLD UIN Sunan Kalijaga terlihat bahwa di antara persoalan utama yang dihadapi siswa-siswi penyandang disabilitas terkait akses mereka ke perguruan tinggi, terutama mereka yang bersekolah di SLB, adalah kenyataan bahwa pihak sekolah sendiri termasuk para guru banyak yang belum memahami bahwa para siswa memiliki hak untuk masuk perguruan tinggi dan bahwa semua perguruan tinggi wajib secara hukum untuk menerima penyandang disabilitas.⁶ Sementara itu, di sisi lain, para siswa penyandang disabilitas kurang mendapatkan motivasi dan informasi mengenai perguruan tinggi dan bagaimana cara mengaksesnya.

Pentingnya penyandang disabilitas mengikuti program pemberdayaan semacam ini juga didasari fakta bahwa sebagian mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang relatif rendah. Adanya stigma di masyarakat tentang disabilitas atau sikap yang *over-protective* dari orang tua pada anaknya yang memiliki disabilitas juga sangat riskan dalam menumbuhkan citra dan penilaian diri yang negatif di kalangan penyandang disabilitas. Beberapa karakteristik menunjukkan sikap negative mereka, di antaranya rasa minder, emosi yang kurang stabil dan tingkat kecemasan yang tinggi. Karakteristik ini tentu saja bukan sifat alamiah atau bawaan, tetapi lebih karena adanya hambatan bagi mereka dalam melakukan interaksi dan eksplorasi sosial karena disabilitas yang dimilikinya.⁷ Dengan adanya pemberdayaan ini, siswa-siswi penyandang disabilitas ditingkatkan motivasi dan penghargaan diri mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk lebih asertif, percaya diri dan tertantang untuk mencapai kemandirian dan mengaktualkan potensi akademik mereka.

UIN Sunan Kalijaga sendiri merupakan salah satu kampus di Indonesia yang memiliki jumlah mahasiswa penyandang disabilitas terbesar. UIN Sunan Kalijaga juga merupakan universitas pertama di Indonesia yang memiliki center khusus sebagai pusat layanan mahasiswa penyandang disabilitas, yakni Pusat Layanan Difabel (PLD) yang didirikan pada tahun 2017 dengan nama Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD). Data terakhir pada tahun ajaran 2016/2017, UIN Sunan Kalijaga tercatat memiliki 72 mahasiswa dengan disabilitas; 29 mahasiswa tuna netra, 23 mahasiswa tuna rungu, 16 mahasiswa tuna daksa, dan 4 mahasiswa dengan jenis disabilitas lainnya termasuk *cerebral palsy*. Program pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, termasuk pemberdayaan dalam meningkatkan akses mereka ke pendidikan tinggi, sudah dilakukan sejak awal berdirinya PLD. Kegiatan ini merupakan bagian dari

⁶ Pengalaman penulis dari berbagai kegiatan PLD UIN Sunan Kalijaga yang melibatkan guru SLB dan pengalaman selama melakukan pendampingan terhadap mahasiswa difabel di PLD.

⁷ Laporan Penelitian Problem Pembelajaran, *Ibid.*, hlm. 21

implementasi dari visi dan misi UIN Sunan Kalijaga serta PLD itu sendiri, yaitu terlibat secara aktif dalam menciptakan kampus yang inklusif, yang ramah dan terbuka terhadap berbagai perbedaan dari peserta didik dan *sivitas akademika* secara umum.

B. Tujuan dan Output Kegiatan

Kegiatan pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas ini dilakukan pada tahun 2015, dengan sasaran siswa-siswi penyandang disabilitas di berbagai SMA Luar Biasa dan SMA Inklusi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama mereka yang duduk di bangku kelas 11 dan 12. Kegiatan ini melibatkan para mahasiswa dengan disabilitas dari UIN Sunan Kalijaga yang mengambil peran sebagai *peer-support* (dukungan sebaya) bagi komunitasnya. Keterlibatan para mahasiswa penyandang disabilitas juga ditujukan sebagai *role model* (model panutan) bagi siswa-siswi terkait akses mereka di perguruan tinggi.

Kelompok dampingan ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, antara lain: *Pertama*, siswa kelas 11 dan 12 sedang memasuki masa akhir di sekolah menengah yang lebih memerlukan pendampingan agar mereka memiliki orientasi dan motivasi memasuki jenjang pendidikan tinggi yang menjadi hak mereka. *Kedua*, siswa-siswi dampingan mencakup beragam disabilitas tanpa membedakan jenis disabilitas masing-masing mengingat kenyataan bahwa mereka menghadapi situasi yang sama, yaitu minimnya informasi dan akses terhadap perguruan tinggi.

Melalui kegiatan penjangkauan (*outreach*) dan *assessment* akhirnya dipilih 21 (dua puluh satu) siswa-siswi dengan disabilitas sebagai kelompok dampingan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Kegiatan pendampingan dilakukan secara berkala sepanjang tahun 2015 dengan fokus pada kelompok dampingan yang berjumlah 21 orang tersebut. Kelompok ini secara intensif mendapatkan pelatihan dan kegiatan pendampingan terkait lainnya, dengan *output* sebagai berikut:

- Kelompok dampingan mendapatkan *insight* (pemahaman diri) serta tumbuh kesadaran dan pemikiran kritis mereka bahwa akses terhadap pendidikan tinggi merupakan hak mereka yang dijamin oleh undang-undang, dimana mereka memiliki hak yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi sebagaimana siswa-siswi lain pada umumnya.
- Kelompok dampingan termotivasi untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi.
- Kelompok dampingan mendapatkan informasi yang memadai mengenai perguruan tinggi, bagaimana cara mengaksesnya, serta beragam persoalan yang mungkin mereka hadapi ketika masuk perguruan tinggi.
- Kelompok dampingan termotivasi untuk menjadi agen perubahan yang akan menjadi bagian dari mereka yang melakukan transformasi, khususnya di kalangan penyandang disabilitas dan di masyarakat yang lebih luas pada umumnya.
- Kelompok dampingan dapat meningkatkan kapasitasnya menjadi individu yang mandiri dan berdaya untuk menentukan masa depannya sendiri, sesuai dengan latar belakang pendidikan, sosial dan budaya serta kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.

C. Konsep Disabilitas dan Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal bahasa Inggris *empowerment*, dimana secara leksikal berarti 'pemberkuasaan' atau 'peningkatan kekuasaan.' Pemberdayaan secara konseptual merupakan usaha perubahan struktur sosial dengan cara memberikan kekuasaan kepada kelompok yang tidak beruntung.⁸ Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai inisiatif-inisiatif untuk mengkaitkan dan mensinergikan antara

⁸ Huraerah A., *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2011), hlm. 96.

kekuatan individu, *social support system* (sistem dukungan sosial) dan perilaku proaktif, bertujuan untuk mengubah kebijakan publik dan perubahan sosial. Dalam konteks pendekatan pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang responsif, berlandaskan pada *mutual-help* (saling tolong menolong) dalam upaya melakukan perubahan pada level individu dan level masyarakat.⁹

Terminologi yang dipakai untuk penyandang disabilitas sendiri mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Istilah ‘penyandang disabilitas’ merupakan terminologi yang dipakai dalam undang-undang terbaru di Indonesia, yakni Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelumnya pemerintah menggunakan istilah ‘cacat’ atau ‘kecacatan’ dalam berbagai peraturan dan dokumen terkait lainnya, dimana istilah tersebut banyak menimbulkan penolakan karena dipandang tidak *empowering* dan cenderung merendahkan komunitas penyandang disabilitas. Istilah ‘difabel’ merupakan terminologi yang banyak dipilih, termasuk oleh UIN Sunan Kalijaga dan beberapa lembaga penggerak isu disabilitas, seperti SIGAP di Yogyakarta.¹⁰ Istilah difabel merupakan akronim dari istilah Bahasa Inggris ‘*differently abled people*’ yang menekankan pada kata ‘*able*’ (mampu).¹¹ Dalam istilah ini penyandang disabilitas ditempatkan sebagai orang yang mampu sebagaimana orang pada umumnya, meski dengan cara yang berbeda. Oleh karenanya istilah difabel dipandang lebih netral, adil dan mencerminkan kesetaraan penuh, karena bukan ‘kemampuannya yang berbeda’ tapi baik mereka yang memiliki disabilitas dan tidak dipandang ‘sama-sama mampu dengan cara yang berbeda-beda.’

Secara khusus, pendekatan pemberdayaan harus mengandung enam strategi dasar sebagai berikut:¹²

1. *Learning by doing*. Pemberdayaan adalah proses melakukan dan belajar sekaligus. Dalam hal ini, pemberdayaan sesungguhnya adalah proses belajar terus menerus dalam rangka mengeksplorasi, menemukan masalah dan melakukan aksi.
2. *Problem solving*. Pemberdayaan adalah proses menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan cara yang tepat, kontekstual dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat harus terlibat dalam penemuan dan aplikasi solusi bagi mereka sendiri.
3. *Self-evaluation*. Evaluasi diri mutlak dilakukan dalam proses pemberdayaan dalam rangka selalu mengkritisi, melakukan perubahan dan perkembangan. Evaluasi ini penting dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.
4. *Self-development dan coordination*. Perkembangan diri dan koordinasi dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.
5. *Self-selection*. Masyarakat harus terlibat aktif dalam melakukan seleksi terhadap masalah, program, tujuan dan cakupan pemberdayaan secara mandiri.
6. *Self-decision*. Masyarakat idealnya mampu membuat keputusan sendiri, dimana hal ini bisa dicapai apabila masyarakat memiliki kepercayaan diri yang baik mengenai kemampuan mereka.

Dalam program pengabdian ini diaplikasikan teknik-teknik pemberdayaan. Teknik-teknik pengabdian tersebut terutama difokuskan pada upaya pelibatan komunitas dampingan serta mendorong partisipasi mereka secara maksimal. Hal ini ditujukan untuk mendorong kemandirian komunitas sehingga pada akhirnya mereka akan mampu mengorganisir diri sebagai kelompok penyandang disabilitas yang

⁹ Perkins, D. & Zimmerman MA., ‘Empowerment Theory, Research and Application,’ *American Journal of Community Psychology*, Vol. 23, No. 5, 199, hlm. 569

¹⁰ SIGAP, *Laporan Tahunan 2014-2015 SIGAP* (Yogyakarta: SIGAP, 2016).

¹¹ Mansour Fakhir merupakan salah satu tokoh yang pertama mencetuskan istilah ‘difabel’ ini sebagai bagian dari upaya *empowering* terhadap komunitas penyandang disabilitas di Indonesia. Fakhir M., *Hak Asasi Manusia Ancaman dan Peluang Tegaknya Keadilan*, pengantar dalam buku Eko Prasetyo, HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal, (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001), hlm. v

¹² Hurairah A., *Pengorganisasian dan Pengembangan*, hlm. 100. Lihat juga OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), *Disability in Higher Education* (Paris: OECD, 2003).

mandiri dan memiliki *power* khususnya terkait upaya mengakses pendidikan tinggi dan partisipasi sosial mereka yang lebih besar di masyarakat pada umumnya.

D. Proses Advokasi dan Pemberdayaan

Sebagaimana dijelaskan di atas kegiatan pendampingan ini dilakukan secara berkala sepanjang tahun 2015 dengan fokus pada kelompok dampingan yang berjumlah 21 (dua puluh satu) siswa-siswi dengan disabilitas dari SLB dan SMA inklusi di DIY. Secara umum kegiatan pendampingan terbagi dalam 3 (tiga) tahap pemberdayaan.¹³ *Pertama*, proses *assessment* dan *engagement*. Dalam proses *assessment* ini, tim melakukan proses penggalian kebutuhan (*need assessment*), yakni terkait apa saja masalah, hambatan, dan kebutuhan siswa-siswi penyandang disabilitas untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Sejak awal proses dimulainya kegiatan, tim juga secara berkala telah melakukan proses *engagement* (membangun hubungan baik) dengan kelompok dampingan. Dalam hal ini tim mengeksplorasi kebutuhan dan masukan langsung dari kelompok dampingan, berdasarkan suara dan sudut pandang mereka sendiri. Dengan demikian, kegiatan dan pendekatan yang dilakukan benar-benar berbasis pada masalah yang diidentifikasi sendiri oleh kelompok dampingan.

Kedua, proses *pemberdayaan/intervensi*. Pada tahap ini dilakukan proses pemberdayaan atau intervensi itu sendiri yang meliputi kegiatan-kegiatan sosialisasi, workshop, monitoring/pendampingan dan evaluasi dari keseluruhan program pengabdian itu sendiri.

Ketiga, proses terminasi dan evaluasi. Salah satu tujuan utama dari proses terminasi adalah sebagai upaya mempersiapkan komunitas dampingan untuk bisa tetap mandiri dan fokus pada keberlanjutan kegiatan pendampingan setelah kegiatan pendampingan oleh tim pengabdian berakhir. Pada tahap terminasi ini tim pengabdian melibatkan kelompok dampingan secara aktif, dimana mereka diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program dan upaya perbaikan serta keberlangsungannya di masa mendatang. Proses evaluasi pada kegiatan pengabdian ini dilakukan dua tahap, yakni di tengah dan akhir program.

Secara rinci ketiga proses kegiatan pendampingan tersebut di atas dilakukan dengan rangkaian aktifitas, antara lain:

1. Tahapan Sosialisasi dan Engagement

Dalam tahapan ini diselenggarakan dua kegiatan, yaitu sosialisasi dan *need assessment*. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim pengabdian dengan melibatkan seluruh SMA, SMK, MA, dan SMA-LB atau yang sederajat di wilayah DIY yang memiliki siswa/siswi dengan disabilitas. Tujuan dari kegiatan ini adalah pengenalan program dan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah diagendakan oleh tim pengabdian kepada guru, staf administrasi, dan siswa/siswi penyandang disabilitas.

Need assessment difokuskan pada upaya penggalian kebutuhan serta upaya eksplorasi persoalan yang dihadapi siswa/siswi penyandang disabilitas, khususnya persoalan yang mereka hadapi dalam mengakses pendidikan tinggi. Kegiatan *need assessment* ini sangat strategis, mengingat tim pemberdayaan membutuhkan masukan-masukan dari siswa/siswi penyandang disabilitas, tidak hanya terkait persoalan akses mereka di perguruan tinggi, namun juga harapan dan strategi apa yang sekiranya bisa mereka lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Hasil dari *need assessment* ini menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk penyusunan kegiatan dan pendekatan pemberdayaan yang diterapkan.

¹³ Tahapan-tahapan ini merujuk pada model penanganan pekerja sosial dalam Case Management, Ballew, J.R., Mink, J., *Case Management in Social Work, Developing The Professional Skills Needed For Work With Multiproblem Clients*. 2nd Edition (USA: Charles C. Thomas Publisher, 1996).

Kegiatan *need assessment* dilakukan oleh tim pengabdian dengan menghadirkan 21 siswa/siswi dampingan serat beberapa *stakeholder* terkait.¹⁴ Beberapa hal penting yang teridentifikasi dalam kegiatan *need assessment* ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kebutuhan siswa/siswi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian ini bukan hanya terbatas sebagai peserta, namun ada keinginan yang kuat agar mereka juga bisa terlibat sebagai narasumber. Keterlibatan siswa/siswi penyandang disabilitas atau mereka yang sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi diharapkan bisa menginspirasi peserta terkait motivasi untuk masuk ke perguruan tinggi, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, serta tantangan dan hambatan yang harus mereka antisipasi sebelum mereka masuk ke perguruan tinggi.
- b. Kegiatan pendampingan bagi komunitas ini lebih efektif bila dilaksanakan pada hari Minggu atau hari libur lainnya dengan alasan agar tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah.
- c. Kegiatan pendampingan tidak dilakukan dengan metode ceramah klasikal sebagaimana kegiatan workshop pada umumnya. Kegiatan pendampingan dengan unsur *recreational* (rekreasi) membuat keterlibatan peserta lebih maksimal.
- d. Selain adanya *output* yang jelas, peserta juga mengharapkan agar tim pengabdian bisa memfasilitasi tindak lanjut dari kegiatan pendampingan ini sehingga terjamin dari aspek *sustainability*-nya (keberlanjutan) pasca berakhirnya kegiatan pendampingan.
- e. Kegiatan semestinya melibatkan para guru, khususnya GPK (Guru Pendamping Kelas) yang selama ini menjadi pendamping di kelas di SMA inklusi. Para guru hendaknya dilibatkan dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan, sehingga mereka bisa memberikan masukan dan, lebih lanjut, diharapkan agar mereka juga bisa mengembangkan program serupa di sekolah-sekolah lain.
- f. Tim pengabdian diharapkan bisa menyediakan bahan ajar, materi, dan panduan yang adaptif dan aksesibel untuk semua peserta dengan berbagai jenis disabilitas.
- g. Di antara beberapa materi yang diusulkan oleh para peserta dalam kegiatan *need assessment* antara lain: Peningkatan motivasi diri, strategi belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa penyandang disabilitas, hambatan dan tantangan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi, profil dan kegiatan komunitas difabel di UIN Sunan Kalijaga (*lesson learned*) termasuk kegiatan advokasi di dalam dan di luar kampus, jurusan atau program studi di perguruan tinggi menerima siswa dengan disabilitas, serta *success story* penyandang disabilitas yang telah lulus dari perguruan tinggi. Beberapa tema terkait strategi belajar efektif juga diusulkan oleh peserta dalam kegiatan *need assessment* tersebut, antara lain *time management*, *problem-solving*, asertivitas dan komunikasi efektif, *note taking*, serta beberapa tema terkait lainnya.
- h. Pentingnya tim pengabdian untuk melibatkan pihak manajemen sekolah, bukan hanya guru, seperti kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling (BK), serta staf administrasi dalam kegiatan pendampingan ini. Keterlibatan mereka diharapkan bisa mendorong munculnya kegiatan pendampingan yang dinisiasi oleh pihak sekolah sebagai agenda kegiatan sekolah secara rutin dan berkala.
- i. Keterlibatan mahasiswa penyandang disabilitas dari luar kampus UIN Sunan Kalijaga diharapkan bisa membuka wawasan baru bagi para siswa/siswi, sehingga mereka mendapatkan referensi pengalaman yang lebih beragam.
- j. Kegiatan semestinya melibatkan narasumber dari kalangan dosen dengan beragam bidang keilmuan yang memiliki pengalaman mengajar mahasiswa penyandang disabilitas. Pengalaman

¹⁴ Kegiatan *need assessment* diselenggarakan di Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga pada hari Sabtu, 22 Agustus 2015, pukul 15.00- selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh semua siswa/siswi dampingan (21 orang) serta beberapa stakeholder terkait lainnya, termasuk guru pendamping khusus (GPK) dari beberapa sekolah inklusi di Yogyakarta.

dari para dosen tersebut akan memberi gambaran bagaimana situasi kelas inklusi dengan segala persoalannya.

- k. Pendekatan pemberdayaan semestinya benar-benar dilakukan dalam kegiatan ini, dimana keterlibatan para penyandang disabilitas semestinya dimulai sejak proses perencanaan kegiatan, implementasi, hingga proses monitoring dan evaluasi program. Dalam hal ini perlu dihindari bentuk keterlibatan penyandang disabilitas sebagai obyek kegiatan sebagaimana yang terjadi pada beberapa kegiatan pendampingan selama ini.
- l. Kegiatan pengabdian ini, lebih lanjut, diharapkan sebagai bagian dari kegiatan advokasi bagi komunitas dalam skala luar. Dalam hal ini keterlibatan DPO (*Disabled people organization*) atau LSM dan Orsos penggiat isu disabilitas menjadi sangat penting.
- m. Lebih lanjut *output kegiatan* yang diharapkan oleh para peserta kegiatan *need assessment* antara lain: Terbentuknya forum advokasi penyandang disabilitas di perguruan tinggi, pelaksanaan kegiatan advokasi terhadap pemerintah/pembuat kebijakan dan *stakeholders* terkait partisipasi penyandang disabilitas di perguruan tinggi, dan kegiatan sosialisasi secara rutin dan berkala di sekolah-sekolah di DIY, khususnya sekolah yang mempunyai siswa/siswi penyandang disabilitas, untuk mendorong mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

2. Tahapan Intervensi: Pemberdayaan dan Pendampingan

Dalam tahapan ini diselenggarakan beberapa kegiatan yang mencakup: Workshop Desain Program, Workshop Pembuatan Modul Training, pelaksanaan Training Pra-Universitas, dan kegiatan Pendampingan serta Networking.¹⁵

a. Workshop Desain Program Pemberdayaan

Kegiatan ini bertujuan untuk memformulasikan seperangkat modul training yang menjadi panduan bagi tim fasilitator dan pengelola kegiatan pengabdian ini dalam menyelenggarakan seluruh rangkaian pelatihan bagi siswa/siswi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, kegiatan diselenggarakan dengan mengundang peserta dari tim ahli PLD UIN Sunan Kalijaga, perwakilan siswa/siswi penyandang disabilitas, mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga, dan guru pendamping khusus (GPK) dari sekolah inklusi dan SLB se-DIY.

Beberapa tema atau materi yang dibahas dalam kegiatan workshop ini, antara lain: 1) Pemaparan hasil *need assessment*; 2) Perencanaan/desain program pemberdayaan dan advokasi difabel dalam mengakses pendidikan tinggi; 3) Diskusi kelompok dan presentasi kelompok dan: 4) Workplan dan pembagian penanggung jawab (PJ) pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

b. Workshop Pembuatan Modul Training

Modul training yang menjadi output dari kegiatan workshop ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, antara lain:

- a) Modul tentang *Achievement Motivation Training* (AMT), dimana modul ini membahas beberapa tema spesifik antara lain Breaking Mental Block, Who am I, Purpose and Goals in Life, Peta Jalan Menuju Kesuksesan, serta Success Story Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi.
- b) Modul tentang Budaya Belajar di Perguruan Tinggi dan *Study Skills*, dimana didiskusikan di dalam modul ini beberapa tema, antara lain: Filosofi Pendidikan Andragogi, Cara Belajar (Visual, Auditori dan Kinestetik), Kemadirian Penyandang Disabilitas menuju Sukses di

¹⁵ Semua rangkaian kegiatan intervensi ini lakukan pada rentang waktu mulai bulan Agustus hingga Desember 2015.

Perguruan Tinggi, dan Studi Kasus tentang Tantangan dan Hambatan Difabel di Perguruan Tinggi.

- c) Modul tentang Filosofi Pendidikan Inklusi dan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas.

c. Pre-University Training

Sebagaimana dijelaskan di atas, inti dari kegiatan ini adalah pelatihan bagi para penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan tinggi. Kegiatan training ini menggunakan modul-modul yang telah dihasilkan sebelumnya oleh tim penyusun melalui kegiatan workshop penyusunan modul training.

Tujuan dari training ini adalah meningkatkan pemahaman di kalangan penyandang disabilitas mengenai bagaimana budaya akademik di perguruan tinggi, pentingnya pendidikan tinggi, upaya-upaya yang bisa dilakukan guna mengeksplorasi minat dan potensi akademis komunitas penyandang disabilitas untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi, serta meningkatkan kepercayaan diri, motivasi dan kemandirian mereka untuk mengakses pendidikan tinggi yang menjadi hak mereka.

d. Pendampingan dan Networking.

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian mengorganisir forum-forum pendampingan, termasuk di dalamnya melaksanakan program monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya memantau perkembangan siswa/siswi penyandang disabilitas yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan, khususnya terkait inisiatif dan kemandiriannya dalam mempersiapkan diri mereka menuju perguruan tinggi. Secara khusus pendampingan terhadap mereka pasca pelaksanaan pelatihan difokuskan pada upaya membangun komunikasi yang intensif, sehingga secara berkala akan termonitor progres dari capaian mereka terkait bagaimana persiapan mereka untuk kuliah di perguruan tinggi serta langkah-langkah apa saja yang telah mereka lakukan guna meningkatkan kapasitas mereka menuju jenjang pendidikan tinggi.

Dalam hal ini, tim pengabdian melibatkan orang tua dan keluarga dari para penyandang disabilitas dalam forum/pertemuan untuk memotivasi agar mereka bisa menjadi *support system* yang memberikan penguatan psikologis dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka untuk kuliah di perguruan tinggi. Keterlibatan orang tua dan keluarga ini juga dimaksudkan untuk menguatkan komitmen mereka untuk mendukung para penyandang disabilitas, tidak hanya pada proses masuk perguruan tinggi namun juga menjadi *support system* bagi penyandang disabilitas dalam menyelesaikan pendidikan tinggi mereka. Dalam hal ini, dukungan dari orang tua dan keluarga juga termasuk dukungan finansial, mengingat kenyataan bahwa tingkat keengganan orang tua untuk membiayai anak difabel mereka ke perguruan tinggi masih tinggi. Minimnya ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas membuat para orang tua masih berfikir bahwa membiayai kuliah anak mereka yang memiliki disabilitas bukanlah investasi yang sepadan bagi masa depan keluarga. Dalam beberapa kasus, orang tua akan memprioritaskan biaya kuliah bagi anak mereka yang tidak memiliki disabilitas meskipun dari sisi prestasi anak mereka yang difabel lebih menunjukkan potensi akademik yang tinggi.

Sebagai bagian dari kegiatan pendampingan ini, tim pengabdian juga melakukan advokasi terhadap pihak universitas, terutama terkait penerapan kebijakan afirmatif terhadap penyandang disabilitas dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi. *Affirmative action* (diskriminasi positif) dari pihak perguruan tinggi menjadi salah satu faktor bagi peningkatan akses penyandang disabilitas, mengingat jumlah penyandang disabilitas yang berhasil masuk di perguruan tinggi di Indonesia masih sangat kecil di banding populasi pada umumnya. Kenyataan bahwa sistem pendidikan di sekolah menengah masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor mengapa

daya saing mereka untuk masuk di perguruan tinggi cenderung rendah. Seperti contoh, kurikulum yang diterapkan di sekolah menengah luar biasa saat ini berbeda baik dari sisi muatan maupun kualitasnya, sehingga akan sangat sulit bagi lulusan sekolah luar biasa untuk bisa berkompetisi dengan lulusan sekolah menengah pada umumnya. Kebijakan afirmatif, seperti pemberian kuota khusus bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu contoh kebijakan yang diadvokasi oleh Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga untuk mendukung akses penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Kebijakan ini sudah diterapkan oleh UIN Sunan Kalijaga selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai bagian dari kebijakan UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus inklusi di Indonesia.

Advokasi juga dilakukan oleh tim pengabdian di level fakultas dan program studi, khususnya di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga. Advokasi diprioritaskan pada fakultas dan prodi yang tercatat memiliki persoalan terkait penerimaan mahasiswa dengan disabilitas, baik persoalan penolakan maupun persoalan terkait lainnya. Kegiatan dilakukan dengan cara audiensi, dimana tim pengabdian melibatkan mahasiswa penyandang disabilitas dari fakultas atau program studi terkait untuk memberikan testimoni mengenai hambatan pembelajaran dan layanan akademik yang dialami. Tujuan dari kegiatan audiensi ini antara lain untuk membangun kesadaran pemangku kebijakan/pengelola pada fakultas dan program studi serta, lebih lanjut, mendorong pembuatan kebijakan baru yang lebih inklusif.

3. Terminasi dan Evaluasi program

Terminasi merupakan proses penting yang harus dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kedekatan antara tim pengabdian dengan komunitas dampingan yang kuat karena intensitas pertemuan dan komunikasi antara kedua belah pihak selama pelaksanaan kegiatan, tanpa disadari akan menguatkan ikatan atau *bonding* secara emosional yang kadang kala melampaui batas yang direncanakan. Ikatan emosional yang kuat tersebut pada dasarnya menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan kegiatan pengabdian itu sendiri. Namun, di sisi lain, *bonding* yang terlalu kuat antara komunitas dampingan dengan tim pengabdian juga bisa berdampak negatif bila tidak direspon oleh tim pengabdian secara proporsional. Tidak jarang ditemukan kasus bahwa komunitas dampingan justru menjadi sangat terpuruk ketika pada akhirnya tim pengabdian yang selama ini mendampingi mereka harus pergi meninggalkan lokasi dan mengakhiri kegiatan.

Terminasi merupakan prosedur sistematis yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam rangka mempersiapkan komunitas dampingan untuk bisa tetap mandiri dan fokus pada keberlanjutan kegiatan pendampingan setelah kegiatan pendampingan oleh tim pengabdian berakhir. Proses terminasi ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif, terutama terkait ketergantungan komunitas pada bantuan dan layanan yang diberikan oleh tim pengabdian.¹⁶ Dalam beberapa kasus, proses terminasi ini bisa menjadi proses yang paling inti (*core activities*) dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, karena kesiapan dan kemandirian komunitas dampingan sangat menentukan kesinambungan kegiatan pemberdayaan pasca berakhirnya kegiatan pendampingan oleh tim. Sebagaimana dijelaskan di atas, banyak kegiatan pendampingan yang sangat bagus namun tidak terjaga kesinambungannya karena komunitas dampingan tidak disipakan dengan baik untuk mengelola kegiatan pendampingan oleh mereka dan bagi mereka sendiri.

Terkait kegiatan terminasi ini, tim pengabdian mengkondisikan siswa/siswi peserta program pendampingan untuk benar-benar mandiri dan berani membuat keputusan dalam rangka memasuki pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, kegiatan pemberdayaan dan pendampingan secara formal telah

¹⁶ Barker, R. *The Social Work Dictionary* (6th ed.) (Washington, DC: NASW Press, 2014); Canadian Association of Social Workers (CASW), *Guidelines for Ethical Practice* (Ottawa, ON: NN, 2005).

berakhir. Proses selanjutnya adalah terbentuknya sebuah kelompok penyandang disabilitas yang secara mandiri mengorganisir diri mereka sendiri serta mendukung satu sama lain untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.

Kegiatan evaluasi diselenggarakan melalui 2 (dua) tahap, yakni di tengah pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk monitoring dan di akhir rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian, masukan dan rekomendasi dari siswa/siswi difabel dan *stakeholders* terkait penyelenggaraan program pemberdayaan. Penyusunan Laporan adalah kegiatan yang paling akhir dilakukan dalam rangkaian kegiatan pengabdian ini. Penulisan laporan kegiatan ini pada dasarnya sebagai representasi pertanggungjawaban dan implementasi akuntabilitas (pertanggung gugatan) pihak fasilitator/tim pengabdian bukan hanya terhadap pihak sponsor, tetapi juga kepada komunitas dampingan serta publik secara luas.

E. Refleksi: *Lesson Learned* dari Kegiatan Pengabdian

Terlepas dari paparan proses dan hasil dari kegiatan pengabdian, sebagaimana dijelaskan di atas, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil (*lesson learned*) dari pelaksanaan rangkaian kegiatan pengabdian ini, dari proses perencanaan hingga evaluasi program. Di antara beberapa *lesson learned* tersebut antara lain: *Pertama*, kegiatan pendampingan terhadap komunitas penyandang disabilitas ini menegaskan bahwa pada hakekatnya proses pemberdayaan pada sebuah komunitas itu bersifat *long life* (sepanjang hayat). Dalam kenyataannya, pemberdayaan tidak bisa dibatasi oleh jangka waktu atau berbasis proyek dengan cakupan yang sangat terbatas, namun menuntut adanya keberlanjutan. Output dari kegiatan pemberdayaan sendiri tidak selalu bisa di lihat dalam jangka pendek. Dalam konteks ini, salah satu tujuan pemberdayaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi. Capaian atas tujuan tersebut mungkin bisa dilihat dalam proses evaluasi, dimana hasil evaluasi akhir dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kapasitas dan kemandirian yang cukup signifikan dari semua peserta program pendampingan. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar penyandang disabilitas, termasuk mereka yang akhirnya berhasil lolos ke perguruan tinggi masih tetap menunjukkan sikap ketergantungan yang tinggi, dimana mereka secara berkala masih perlu pendampingan dan layanan secara intensif, tidak hanya dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi namun hampir di seluruh proses kegiatan perkuliahan.

Kedua, sebagaimana halnya pemberdayaan, advokasi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga merupakan proses panjang yang menuntut kerja keras para pihak terkait. Dalam konteks ini, tujuan advokasi adalah untuk mengubah persepsi dan cara pandang pemangku kebijakan pendidikan tinggi sehingga diharapkan akan lahir kebijakan perguruan tinggi yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Tujuan ini tentunya tidak akan bisa tercapai dengan mudah, dimana beragam persoalan terkait dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Salah satu contoh, meskipun pada level universitas sudah diterapkan kebijakan yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas, masih banyak program studi dan dosen yang enggan melaksanakan kebijakan universitas itu. Persyaratan tidak memiliki disabilitas masih diterapkan untuk masuk pada program studi tertentu, sedangkan beberapa dosen masih banyak yang mengabaikan kewajiban mereka untuk menerapkan metode pembelajaran adaptif karena mereka berfikir bahwa mahasiswa yang harus menyesuaikan dengan sistem pembelajaran dosen, bukan sebaliknya. Dari pengalaman PLD UIN Sunan Kalijaga selama ini, persoalan semacam ini masih terus muncul dari waktu ke waktu meski sudah bertahun-tahun kegiatan advokasi dilakukan. Dengan demikian, kegiatan advokasi perlu terus menerus dilakukan pada semua level di perguruan tinggi sebagai bagian dari kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

Ketiga, pelibatan guru, orang tua dan *support system* terdekat lain dalam kehidupan individu penyandang disabilitas merupakan salah satu faktor paling signifikan bagi pembentukan kemandirian penyandang disabilitas, terutama terkait akses mereka di perguruan tinggi. Dari 21 (dua puluh satu) siswa/siswi penyandang disabilitas yang tergabung sebagai komunitas dampingan dari kegiatan pengabdian ini, teridentifikasi bahwa hambatan yang dihadapi oleh sebagian sebagian besar dari mereka justru datang dari orang tua dan pihak-pihak terdekat dengan mereka. Yang terjadi justru orang tua dan keluarga para penyandang disabilitas yang ‘menakut-nakuti’ mereka untuk masuk perguruan tinggi karena berbagai alasan. Keterlibatan mereka sebagai bagian dari program pendampingan diharapkan bisa membuka jalan yang lebih lebar bagi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak mereka masuk perguruan tinggi.

Keempat, kegiatan pendampingan dan pemberdayaan sudah semestinya dirancang dan dilaksanakan secara partisipatif. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pelibatan penyandang disabilitas sebagai komunitas dampingan sejak awal perencanaan sampai akhir kegiatan merupakan hal yang sangat vital bagi keberhasilan program itu sendiri. Wacana disabilitas sendiri masih cukup baru, dimana referensi terkait persoalan penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya terkait akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas merupakan resource utama bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian itu sendiri. Merekalah yang paling memahami apa yang menjadi persoalan utama mereka, termasuk persoalan dalam mengakses pendidikan tinggi. Atas dasar itulah kegiatan pengabdian ini, baik dari sisi perencanaan maupun aplikasinya, bertumpu pada *need assessment* dari komunitas dampingan itu sendiri. Para siswa/siswi penyandang disabilitas sebagai komunitas dampingan kegiatan ini secara partisipatif terlibat di semua proses dan komponen pelaksanaan kegiatan, termasuk proses penyusunan modul, penentuan metode pelatihan, penentuan nara sumber, hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Keterlibatan mereka juga diharapkan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan program pemberdayaan bagi komunitas mereka sendiri melalui beberapa kegiatan lanjutan setelah program pengabdian ini berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, *et al.* (2012), *Laporan Penelitian Problem Pembelajaran dan Strategi Coping Mahasiswa Tunarungu/Wicara di PTAIN: Studi Fenomenologis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga)
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2001), *Sensus Tahun 2000*, (Jakarta: BPS)
- Ballew, J.R., Mink, J. (1996), *Case Management in Social Work, Developing The Professional Skills Needed For Work With Multiproblem Clients*, 2nd Edition (USA: Charles C. Thomas Publisher)
- Barker, R (2014), *The Social Work Dictionary* (6th ed.) (Washington, DC: NASW Press)
- Canadian Association of Social Workers (CASW) (2005), *Guidelines for Ethical Practice* (Ottawa, ON: Author)
- Fakih M. (2001), 'Hak Asasi Manusia Ancaman dan Peluang Tegaknya Keadilan', pengantar dalam buku Eko Prasetyo, *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal* (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar)
- Huraerah A. (2011), *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan* (Jakarta: Humaniora).
- International Disability and Development Consortium (IDDC) (2016), *Costing Equity: The Case for Disability-responsive Education Financing* (Brussels: IDDC)
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2003), *Disability in Higher Education* (Paris: OECD)
- Perkins, D. & Zimmerman MA. (1999), 'Empowerment Theory, Research and Application,' *American Journal of Community Psychology*, Vol. 23, No. 5
- Phillips S. & Clarke A. (2010), *Pathways for Disabled Students to Tertiary Education and Employment: Case Studies from Ireland* (Dublin: OECD Report)
- Plan International Indonesia (2016), *Child Rights Situation Analysis in Indonesia in 2016* (Jakarta: Plan International, unpublished)
- PSLD UIN Sunan Kalijaga (2007), *Eksklusi Sosial terhadap Mahasiswa Difabel di Lingkup UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga)
- SIGAP (2016), *Laporan Tahunan 2014-2015 SIGAP* (Yogyakarta: SIGAP)
- The World Bank, AHED-UPESD, & PSLD UIN Sunan Kalijaga (2010), *Equity and Access in Tertiary Education* (Report Unpublished)